



Yang Kencang Pun Jadi Kendor

Hari Ini DPRD Gelar Paripurna Pilwagub di Tengah Pandemi Corona

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya sepakat menyelenggarakan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) di tengah pandemi Covid-19. Acara tersebut digelar hari ini Senin (6/4/2020), di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, hampir semua Fraksi di DPRD DKI menyatakan akan menghadiri acara paripurna pilwagub tersebut. Fraksi PDIP dan Fraksi NasDem misalnya, dua fraksi ini awalnya kencang menolak proses pilwagub di tengah wabah virus Corona. Namun akhirnya menyatakan sepakat dan akan hadir di acara tersebut.

"Ya, kami Fraksi PDIP sudah sepakat akan menghadiri sidang paripurna pemilihan wagub," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, Minggu (5/4/2020). Gembong pun tak mengelak kalau pihaknya pernah tidak setuju kalau perhelatan pemilihan wagub dilakukan saat bencana wabah Covid-19 melanda negeri ini.

"Kami memang lebih memikirkan kesehatan ketimbang harus menggelar acara pemilihan wagub. Tapi mau gimana lagi pimpinan dewan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) semuanya sepakat pemilihan wagub digelar Senin, (6/4/2020) dengan segala prosedur kesehatan yang sudah diatur oleh panitia pemilihan (panlih)," ungkapnya.

Senada dengan Fraksi PDIP, Fraksi NasDem pun, menyatakan, akan menghadiri paripurna pemilihan wagub. "Kami diundang Ketua Dewan, yang namanya diundang ya kami harus hadir," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andriano singkat.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad, menyatakan masih merundingkan hal ini terlebih dahulu kepada partai. Sebab menurutnya masih ada kemungkinan perubahan waktu pelaksanaan.

"Saat ini masih koordinasi dan minta masukan partai serta pembahasan internal fraksi untuk kehadiran besok. Karena ada informasi perubahan waktu juga jadi kita masih tunggu kepastian. Perubahan waktu bukan tanggal," kata dia.

Anggota Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Andyka menjelaskan bahwa berjalannya paripurna ha-



Anggota DPRD jangan anggap enteng dengan wabah virus Corona, dan jangan berusaha menentang maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi.

Neta S. Pane
Ketua Presidium Indonesia Police Watch

rus dihadiri setidaknya 54 anggota DPRD. Dengan begitu anggota dewan bisa melaksanakan pemilihan sesuai tata tertib. Sejauh ini, ia menyatakan menurut koordinasi dari para fraksi akan menghadiri acara tersebut.

"Kuorum 54 dinyatakan kuorum Insya Allah dari komunikasi politik bangun kita memiliki kesamaan kita punya harus wagub segera juga bisa membantu gubernur dalam penanganan cepat dan tepat terkait wabah corona," cetus dia.

Dua calon wagub yang sudah disepakati oleh Gerindra dan PKS. Meraka ialah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. Keduanya telah menjalani pemaparan visi dan misi Wagub di depan para anggota dewan.

Berisiko Tinggi

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane menyarankan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana bersikap tegas dengan meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk tidak menggelar pemilihan Wakil Gubernur pada Senin (06/04/2020).

Pasalnya, selama status tanggap darurat wabah virus Corona (Covid-19), semua lapisan masyarakat harus mematuhi maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melakukan aktifitas kumpul-kumpul. Tak terkecuali anggota DPRD DKI Jakarta.

"Untuk itu Kapolda perlu bersikap tegas kepada Ketua DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta agar membatalkan pemilihan wagub Jakarta yang direncanakan Senin besok," kata Neta, Minggu (05/04/2020).

Menurutnya, anggota DPRD DKI Jakarta juga tidak boleh berusaha menentang maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi soal pembatasan beraktifitas dan larangan

berkumpul. "Anggota DPRD jangan anggap enteng dengan wabah virus Corona, dan jangan berusaha menentang maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi. Karena itu, kami berharap jika itu terjadi Kapolda Metro Jaya harus membubarkannya demi menjaga wibawa maklumat Kapolri dan imbauan presiden," kata Neta.

Ditegaskan, pemilihan wakil gubernur bukan hal yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Buktinya, selama ini tanpa ada wakil gubernur, masyarakat dan Gubernur Jakarta juga tidak mengalami banyak permasalahan. "Semua bisa berjalan normal, yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak makin terganggu. Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia," katanya.

Selain itu, kata Neta, Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. "Tanpa terkecuali jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD tetap nekat melakukan pemilihan wagub," katanya. Menurut Neta, jika Kapolda mem-

berikan izin pelaksanaan pilwagub, artinya, kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali.

"Karena tidak dihargai lagi oleh Kapolda, sebaiknya Kapolri Idham Aziz harus segera mencabut maklumat tersebut. Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan, sama halnya itu tidak ada maklumat dan maklumat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri," imbuh dia.

Terkait keputusan Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI Jakarta yang memastikan akan menggunakan protokol pelaksanaan yang mematuhi social distance, physical distance, Neta mengaku hal itu hanya teori semata.

"Percayalah itu hanya teori. Apalagi kalau kita berkaca pada persoalan di Bekasi yang melaksanakan rapid test toh malah menjadi kacau dan diprotes para media yang hadir. Jadi sangat jelas jika teori berbeda dengan praktik di lapangan. Massa yang berkumpul, akan beresiko tinggi untuk menjadi penyebar wabah Corona," katanya.

Namun, apabila DPRD DKI Jakarta tetap ngotot ingin dilakukan pemilihan wagub, IPW memberi saran dan solusi lain. "Jika DPRD DKI ingin menggelar pemilihan wagub karena mengejar masa kadaluarsa. Dewan harus menyepakati paripurna teleconference," ungkapnya.

"Lalu, teknis pemilihannya, dewan bergantian masuk ruang paripurna dengan perbedaan waktu 12-20 menit untuk setiap anggota DPRD pemilik suara. Ini tidak akan beresiko terhadap pengumpulan massa dan penularan wabah covid 19," imbuh Neta. Menurut Neta, Anggota DPRD DKI Jakarta tidak boleh menganggap enteng dengan wabah virus asal Wuhan, Tiongkok itu. (dni)